

**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR – RI
KE KOTA DEPOK
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2019 – 2020
TANGGAL 12 S/D 14 DESEMBER 2019**

I

I

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

I

I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
DESEMBER 2019**

LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR – RI
KE KOTA DEPOK
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2019 – 2020
TANGGAL 12 S/D 14 DESEMBER 2019

.....

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN SPESIFIK

Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Walikota Depok dan Kantor KPU Kota Depok dilakukan sebagai salah satu langkah pengawasan Komisi II DPR RI terkait kesiapan pilkada serentak tahun 2020.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang keempat pada 23 September 2020. Pilkada diikuti 270 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Kota Depok merupakan satu-satunya kota di Provinsi Jawa Barat yang akan menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, bersamaan dengan 7 kabupaten yang akan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu: Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bandung. Seluruh stakeholders yang terkait dalam pilkada serentak tahun 2020 mengharapkan penyelenggaraan pilkada berjalan lancar dan aman sehingga pilkada akan menjadi ajang pesta demokrasi rakyat dalam menentukan aspirasi masyarakat untuk memilih pemimpin di daerahnya. Partisipasi masyarakat yang tinggi sangat diharapkan untuk menyelesaikan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020.

Persiapan pilkada serentak tahun 2020 telah dimulai sejak satu tahun sebelum hari pemungutan suara. Beberapa hal yang menjadi perhatian Komisi II DPR RI dalam tahap persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 antara lain:

1. Sejak bulan September 2019 telah dimulai penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang harus sudah selesai ppelaksanaannya pada tanggal 1 Oktober 2019. Namun, hingga saat ini dari 270 daerah yang ikut pilkada, masih banyak daerah yang belum menyelesaikan penandatanganan NPHD. Padahal jadwal penyelesaian penandatanganan NPHD sudah diperpanjang hingga 14 Oktober 2019.
2. Pada pilkada serentak tahun 2020 pemutakhiran data dan daftar pemilih berada pada tahapan persiapan padahal pada pilkada sebelumnya pemutakhiran data dan daftar pemilih masuk dalam tahap penyelenggaraan. Pemutakhiran data pemilih hingga penetapan daftar pemilih tetap (DPT) adalah tahapan yang paling krusial selain pungut hitung. Bahkan, di pemilu serentak tahun 2019 yang lalu penetapan DPT dilakukan hingga tiga kali.
3. Selain itu, KPU dan Bawaslu di daerah harus segera menyiapkan pembentukan panitia adhoc seperti: PPK, PPS, PPDP, KPPS, PPPK, PPL,dan PTPS sebagai ujung tombak penyelenggara pilkada di daerahnya masing-masing.
4. Tingkat partisipasi masyarakat Kota Depok dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 mencapai 85.41%. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pilkada untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi.

Tim kunjungan Komisi II DPR RI ke Kota Depok berjumlah **18 orang** anggota yang dipimpin oleh anggota Komisi II DPR RI **Yth. Bapak Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si, M.T./Fraksi Golkar** beserta anggota tim yang terdiri dari:

| NO | No.Anggota | NAMA | KETERANGAN |
|-----------|-------------------|---|------------------------------------|
| 1. | A-270 | Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si, M.T. | Ketua Tim Ketua Komisi II/ F-PG |
| 2. | A-28 | H. Yaqut Cholil Qoumas | Wakil Ketua Kom. II/F-PKB |
| 3. | A-142 | Dr. Junimart Girsang, S.H., MBA, M.H. | Anggota/ F-PDIP |
| 4. | A-263 | Komarudin Watubun, S.H., M.H. | Anggota/ F-PDIP |
| 5. | A-219 | Johan Budi S. Pribowo | Anggota/ F-PDIP |
| 6. | A-195 | Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si. | Anggota/ F-PDIP |
| 7. | A-302 | Nusron Wahid | Anggota/ F-PG |
| 8. | A-315 | Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.SI | Anggota/ F-PG |
| 9. | A-132 | Drs. H. Imran, M.Si | Anggota/ F-GERINDRA |
| 10. | A-116 | R. Imron Amin, SH., MH | Anggota/ F-GERINDRA |
| 11. | A-112 | Drs. Supriyanto | Anggota/ F-GERINDRA |
| 12. | A-384 | M. Syamsul Luthfi, SE | Anggota/ F-NASDEM |
| 13. | A-366 | Drs. H. Tjeptjep Muchtar Soleh, MM | Anggota/ F-NASDEM |
| 14. | A-43 | Drs. H. Ibnu Multazam | Anggota/ F-PKB |
| 15. | A-455 | Dr. Kh Surahman Hidayat., M.A | Anggota/ F-PKS |
| 16. | A-538 | H. Agung Budi Santoso, S.H., M.M | Anggota/ F-PD |
| 17. | A-490 | Dr. (HC) H. Zulkifli Hasan, SE., M.M | Anggota/ F-PAN |
| 18. | A-520 | John Siffy Mirin | Anggota/ F-PAN |
| 19. | ---- | Mahmud, S.E | Sekretariat Komisi II |
| 20. | ---- | Fadhilah Afifah | Sekretariat Komisi II |
| 21. | ---- | Hanung Priasmoro | Sekretariat Komisi II |
| 22. | ---- | Anggia Michel | Tenaga Ahli Komisi II |
| 23. | ---- | Ferdian Nurahman | TV Parlemen |
| 24. | ---- | Hendra Sunandar | Media Sosial |
| 25. | ---- | M. Giri | Driver |

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 1 (satu) tenaga ahli dan 3 (tiga) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, 1 (satu) dari media social DPR RI, dan 1 (satu) reporter dari TV parlemen DPR RI.

B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan spesifik dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 14 Desember 2019. Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Walikota Depok dan Kantor KPU Kota Depok dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan, dibidang pengawasan.

II. HASIL KUNJUNGAN

a. Sambutan Wakil Walikota Depok

Secara geografis Kota Depok memiliki luas wilayah sebanyak 200 km² atau sekitar 20.000 ha dengan jumlah penduduk 1.851.878 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Seluruh daerah di Kota Depok siap untuk melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. Pilkada merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengajarkan masyarakat arti pentingnya demokrasi. Pada pemilu serentak tahun 2019, partisipasi masyarakat Kota Depok dalam pesta demokrasi terbilang tinggi mencapai 85.4%. Hal ini dapat terjadi atas kerjasama penyelenggara pemilu, peserta pemilu, masyarakat, dan dukungan dari Polres dan Kodim. Masyarakat Kota Depok merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa antara lain: Suku Jawa 35%, Suku Betawi 31%, Suku Sunda 17% dan selebihnya dari daerah lain. Kota Depok secara wilayah dekat dengan Provinsi DKI Jakarta, meskipun secara demografis termasuk dalam wilayah provinsi Jawa Barat. Selama ini, dalam pelaksanaan pilkada di Kota Depok belum pernah terjadi kekisruhan atau pertikaian di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Depok berharap pilkada serentak tahun 2020 yang akan datang juga berjalan dengan damai.

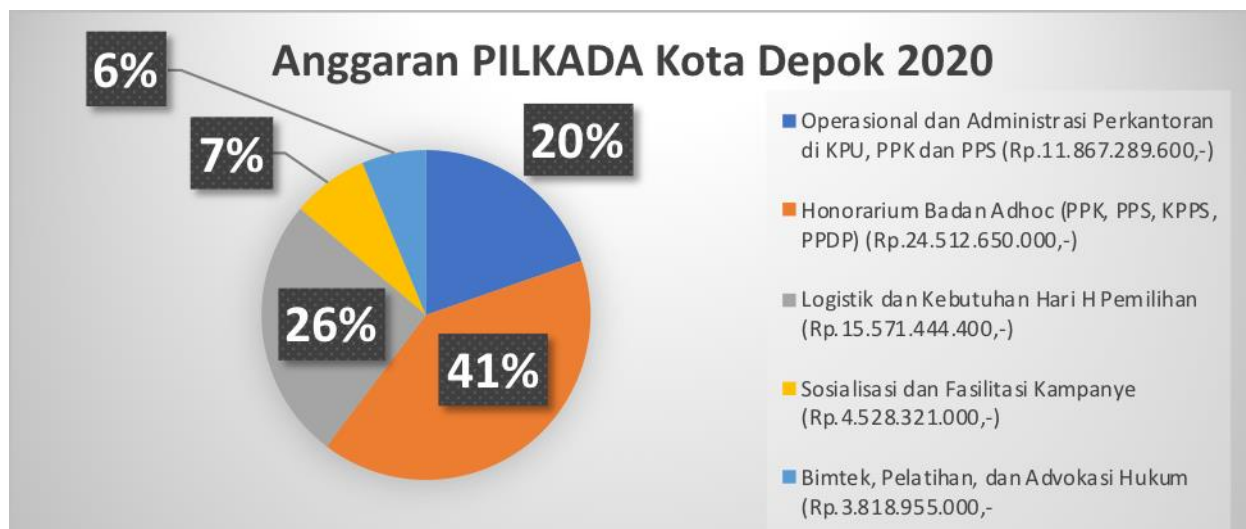
b. Pemaparan Ketua KPU Kota Depok

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Depok dengan KPU Kota Depok sebesar Rp60.298.660.000,- pada tanggal 1 Oktober 2019. Kendala-kendala yang dihadapi KPU Kota Depok dalam penyusunan NPHD antara lain:

1. Kekurangan anggaran dari yang telah disediakan, setelah terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-735/MK.02/2018 perihal Usulan Standar Biaya Honorarium Badan Ad Hoc Pemilihan 2020.
2. Dari anggaran yang telah disediakan, KPU Kota Depok melakukan pencermatan kembali dan rasionalisasi kembali anggaran yang telah disediakan, dengan tetap menaikkan honorarium Badan Ad Hoc.

Alokasi anggaran yang paling besar diperuntukkan untuk membiayai honorarium badan adhoc yang mengalami kenaikan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-735/MK.02/2018 perihal Usulan Standar Biaya Honorarium Badan Ad Hoc Pemilihan 2020. Selain itu, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kebutuhan logistik dan kebutuhan lainnya pada saat hari H di lapangan.

Gambar 1.1. Anggaran Pilkada Kota Depok



Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Depok berdasarkan pemilu 2019 laki-laki berjumlah 650,283 jiwa dan perempuan berjumlah 659,055 jiwa sehingga total pemilih berdasarkan DPT pemilu terakhir berjumlah 1,309,338 jiwa. Sedangkan untuk jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diperkirakan pada pilkada serentak tahun 2020 di Kota Depok berjumlah 3.417 TPS dengan asumsi pemilih 1 TPS berjumlah 400 orang.

Kesiapan KPU Kota Depok dalam tahapan pilkada serentak tahun 2020 lainnya yaitu:

- a. Peluncuran dan Kesiapan Pemilihan 2020 Tingkat Nasional Tanggal 23 September 2019;
- b. Peluncuran atau Launching Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 akan dilaksanakan Tanggal 23 Januari 2020 (tentatif);
- c. KPU Kota Depok juga akan melakukan rekrutmen Badan Ad Hoc (PPK, PPS dan KPPS), karenanya KPU Kota Depok melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mempersiapkan tahapan rekrutmen ini;
- d. Selain itu KPU Kota Depok juga melakukan evaluasi terhadap mereka yang masih memungkinkan atau tidak untuk terlibat kembali sebagai penyelenggara
- e. Proses pendaftaran pemantau telah lakukan dengan mengumumkan pendaftaran lembaga pemantau dan lembaga survey, tapi sampai saat ini belum ada yang mendaftar;
- f. Terkait sosialisasi, KPU Kota Depok telah melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, dan terus akan dilakukan agar ada peningkatan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada 2020 yang akan datang;
- g. Terkait dengan pemutakhiran data dan daftar pemilih, KPU Kota Depok melakukan koordinasi yang intensif dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok terkait dengan DP4, pemilih pemula dan juga terkait pelayanan hak pilih bagi mereka yang berada di Rutan. Selain itu juga penggunaan aplikasi Sidalih dan Sicoklit akan memaksimalkan akurasi dan validitas data pemilih secara profesional dan transparan.

c. Pemaparan Ketua Bawaslu Kota Depok

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Depok dengan Bawaslu Kota Depok sebesar

Rp15.350.000.000,- pada tanggal 1 Oktober 2019. Kendala yang dihadapi Bawaslu Kota Depok dalam penyusunan NPHD antara lain terkait usulan anggaran Bawaslu Kota Depok sebesar 24 milyar tidak dapat terpenuhi dan hanya disetujui sebesar kurang lebih 15 milyar.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, personel Bawaslu Kota Depok terdiri dari 5 orang pimpinan dengan 24 staf sekretariat, beserta badan adhoc yang terdiri dari:

1. Pengawas Kecamatan 33 orang meliputi 11 kecamatan
2. Pengawas Kelurahan 63 orang meliputi 63 kelurahan
3. Pengawas TPS 3.417 orang

Pada tanggal 29 Agustus 2019, Bawaslu Kota Depok telah melakukan “Deklarasi Kesiapan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020” yang dihadiri oleh Walikota Depok beserta jajarannya, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa barat, Bawaslu Kota Depok, KPU Kota Depok, Muspida, perwakilan partai politik, dan berbagai tokoh masyarakat. Isi deklarasi tersebut antara lain:

1. Bawaslu dan masyarakat Kota Depok siap berperan aktif dalam kebersamaan mewujudkan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berintegitas.
2. Bawaslu dan masyarakat siap menjunjung tinggi kedamaian dan ketentraman Masyarakat Kota Depok.
3. Bawaslu dan masyarakat siap bersinergi antar masyarakat se-Kota Depok dalam memerangi hoaks, ujaran kebencian, politisasi SARA dan politik uang.

Kesiapan Bawaslu Kota Depok dalam tahapan pilkada serentak tahun 2020 lainnya yaitu:

1. Pengumpulan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pilkada serentak tahun 2020 yang dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan serta sebagai alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi dan deteksi dini. Data IKP disusun berdasarkan informasi dari KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan media massa.
2. Pembentukan platform pengawasan digital yaitu: Si Pitung, LHP *online*, dan Cyber Patrol. Aplikasi Si Pitung merupakan aplikasi berbasis web, yang dapat dijalankan menggunakan *browser* baik dari laptop, tablet maupun android dan dapat menyesuaikan tampilan berdasarkan besar layar dari *device* yang digunakan. Terdapat 3 level user yang dapat mengakses aplikasi ini, yaitu user PTPS, user kecamatan, dan user admin. User PTPS aplikasi dapat diakses melalui url <http://ptps.bawasludepok.com/>, sedangkan untuk user kecamatan dan admin dapat diakses melalui url <http://admin.bawasludepok.com/>. Masing-masing user harus memasukkan username dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya.
3. Membentuk Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif sebagai upaya melakukan pengawasan pemilu partisipatif. Bawaslu Kota Depok berkomitmen melakukan pendidikan sekolah kader pemilu kepada masyarakat dengan membentuk wadah pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan dalam program “Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif.” Program ini sekaligus merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemilu sesuai arahan Bawaslu RI. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Kota Depok telah dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 16 November 2019 dengan peserta sebanyak 82 orang.

4. Pelaksanaan media gathering sebagai upaya membangun sinergitas dengan media cetak, media elektronik, media online, dan lain-lain. Peran media di era keterbukaan informasi saat ini sangat penting dalam meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Program ini telah dilaksanakan pada 29-30 November 2019.
5. Melakukan pengawasan pada kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kota Depok.
6. Melakukan sosialisasi rekrutmen Panwascam mulai tanggal 6-26 November 2019. Lalu, pada tanggal 3 Desember 2019 dibuka pendaftaran dan penerimaan berkas. Pada tanggal 11 Desember 2019 dilakukan pengumuman hasil penelitian administrasi, dari 110 peserta pendaftaran, yang lulus seleksi administrasi berjumlah 99 orang.
7. Kerjasama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait deteksi dini netralitas ASN.
8. Menerbitkan surat himbauan kepada Walikota Depok untuk tidak melakukan mutasi paling lambat 6 bulan sebelum pendaftaran sebagai langkah pencegahan.

d. Pemaparan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat

Proses pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh KPU bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di setiap tingkatan. Data tersebut selalu dirawat Bersama guna menjamin kualitas data dalam pemilu/pilkada. Berdasarkan data kependudukan, dari sekitar 33 juta penduduk di Provinsi Jawa Barat hanya terdapat 0.07% data ganda. Khusus di Kota Depok dari sekitar 1.3 juta penduduk hanya terdapat 4 data ganda. KPU Provinsi Jawa Barat sepakat dengan saran Komisi II DPR RI terkait kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya mencegah money politics. Selama ini, sumber dana pilkada peserta pilkada diketahui dari laporan awal dana kampanye dan laporan akhir dana kampanye. Pada akhir pilkada dilakukan audit dana kampanye yang dilakukan oleh akuntan publik yang hasil auditnya berdasarkan laporan akhir dana kampanye. Akuntan publik tidak mengikuti proses awal hingga penggunaan dana kampanye. KPU Provinsi Jawa Barat telah melakukan penelitian yang bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran terkait DP4. Salah satu rekomendasi hasil penelitian yang tujuannya untuk melakukan kroscek dahulu bahwa data yang dimiliki sudah mendekati realitas adalah pentingnya uji public data setelah pengumuman DP4. Pemutakhiran data pemilih yang memudahkan petugas adalah jika data awal yang diterima (DP4) sudah akurat.

e. Pemaparan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Kontestasi electoral langsung memberikan ruang demokrasi pada publik. Pemilu adalah mekanisme mendapatkan pemimpin yang berintegritas. Isu netralitas ASN dan politisasi birokrasi menjadi prioritas pengawasan Bawaslu karena prinsip fairness/keadilan dalam kontestasi politik harus dilaksanakan dalam pelaksanaan pilkada. Penyelenggara pemilu juga harus mengetahui tugas dan fungsinya dengan baik, terutama dalam upaya menjaga integritas penyelenggara pemilu harus bisa menempatkan diri (menjaga jarak) dalam pola hubungan antar peserta pilkada. Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif dibentuk untuk membantu Bawaslu melakukan pengawasan sebagai upaya mencegah politik transaksional pada pilkada serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Rencana ke depan, di tingkat desa, Bawaslu akan membangun "Kader Demokrasi Desa." Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan

rekomendasi agar dalam penyelenggaraan pilkada ke depan sumber dana pilkada berasal dari APBN, bukan dari APBD seperti saat ini. Hal ini dilakukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya politisasi birokrasi dan pelanggaran netralitas ASN.

f. Pemaparan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok

Berdasarkan data kependudukan, data wajib KTP-el sebanyak 1.351.096 orang dan data pemilih pemula sebanyak 31.286 orang, dan penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el sebanyak 8.178 orang. Saat ini, ketersediaan blanko KTP-el masih kosong. Berdasarkan info dari Kementerian Dalam Negeri blanko KTP-el baru akan tersedia bulan Januari 2020. Terkait masalah penduduk yang telah meninggal dunia yang selalu muncul dalam pilkada. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tidak bisa menghapus database orang yang telah meninggal dunia jika tidak ada pelaporan dari keluarga/masyarakat. Hal ini dapat dicegah melalui hasil pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan KPU untuk dikeluarkan dari DPS atau DPT. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok melakukan perekaman di Lembaga pemasyarakatan dan SMA/SMK bagi pemilih pemula guna menjamin hak pilih masyarakat dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020.

g. Pemaparan Bagian Keuangan Pemerintah Kota Depok

NPHD untuk KPU dan Bawaslu Kota Depok sedang dalam proses pencairan. Terkait jumlah anggaran memang tidak sesuai dengan usulan awal namun sudah disepakati bersama jumlah anggaran pada akhirnya. Jumlah tersebut juga sudah melalui koreksi dan koordinasi dengan Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

h. Kunjungan on the Spot ke Kantor KPU Kota Depok

Kantor KPU Kota Depok terletak di Jl. Kartini No.19, Depok, Kec. Pancoran Mas berada pada kondisi yang kurang optimal untuk mendukung personel KPU Kota Depok menjalankan tugas dan fungsinya. Sarana dan prasarana serta fasilitas yang tersedia sangat minim dan terbatas. Rencana pemindahan Kantor KPU Kota Depok sudah dibahas dengan Pemerintah Kota Depok sejak awal 2018, namun sampai saat ini belum ada langkah tindak lanjut pemindahan kantor tersebut. Ketersediaan anggaran untuk pemindahan kantor KPU sudah dibahas pada APBD Perubahan tahun 2019 dan APBD tahun 2020. Kendala yang dihadapi KPU Kota Depok yaitu terkait proses tukar asset antara Pemerintah Kota Depok dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat. Kantor Kejaksaan Negeri Kota Depok yang saat ditempati merupakan asset Pemerintah Kota Depok dan kantor yang rencananya akan ditempati KPU Kota Depok merupakan asset Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat. Sebenarnya, hanya satu langkah lagi untuk merealisasikan ini yaitu Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat menyerahkan asset ke Pemerintah Kota Depok. Namun, sampai saat ini komunikasi hingga ke Kejaksaan Agung yang mungkin agak sulit. Kantor KPU Kota Depok saat ini telah menghasilkan 3 periode pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dihuni oleh 5 orang komisioner, 17 PNS, dan 20 pegawai.

III. CATATAN RAPAT

1. Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Kota Depok, KPU Kota Depok, dan Bawaslu Kota Depok meningkatkan koordinasi dalam proses pemutakhiran data pemilih untuk memastikan akurasi dan validitas data pemilih (terutama data penduduk yang telah meninggal tidak masuk dalam DPT) agar penduduk yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020.
2. Komisi II DPR RI mendorong percepatan proses tukar asset antara Pemerintah Kota Depok dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat agar Kantor KPU Kota Depok dapat dipindahkan ke tempat yang lebih layak dan representatif guna mendukung kelancaran pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020.
3. Komisi II DPR RI meminta KPU Kota Depok melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula, pemilih manula, dan pemilih yang cacat mental agar meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemilih tentang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020.
4. Komisi II DPR RI mendorong Bawaslu RI meningkatkan pengawasan terhadap potensi pelanggaran netralitas ASN dan melakukan kerjasama dengan KPK dalam upaya pencegahan praktik money politics guna menjamin pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang lebih berkualitas, bermartabat, dan berintegritas.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Kota Depok pada tanggal 12 sampai dengan 14 Desember 2019. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2019

KETUA TIM KUNJUNGAN

KOMISI II DPR RI

Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si, M.T.